



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT KOMISI VII DPR RI
(BIDANG: ENERGI, RISET DAN INOVASI, SERTA INDUSTRI)**

Tahun Sidang	: 2023 – 2024
Masa Persidangan	: IV
Rapat	: Ke – 9 (sembilan)
Jenis Rapat	: Rapat Dengar Pendapat dan Rapat Dengar Pendapat Umum
Dengan	: Plt. Dirjen Minerba KESDM RI, Direktur Utama PT TIMAH Tbk, Pj. Gubernur Kep. Bangka Belitung, Bupati Belitung Timur, Bupati Bangka Tengah, Ketua Umum Asosiasi Eksportir Timah Indonesia, dan Sekretariat Bersama Organisasi Masyarakat Belitung Timur.
Sifat Rapat	: Terbuka
Hari, tanggal	: Selasa, 26 Maret 2024
Waktu	: Pukul 13.00 WIB s.d Selesai
Tempat	: Ruang Rapat Komisi VII DPR RI Gedung Nusantara I Lantai I
Acara	: 1. Penjelasan tentang petunjuk Teknik penerbitan Izin Pertambangan Rakyat (IPR) 2. Lain-lain
Ketua Rapat	: H. Dony Maryadi Oekon, S.T. (Wakil Ketua Komisi VII DPR RI/ F.PDI-Perjuangan)
Sekretaris Rapat	: Dwiyanti, S.Sos.
Hadir	: A. Pemerintah - Plt. Dirjen Minerba Kementerian ESDM RI - Pj. Gubernur Kep. Bangka Belitung - Bupati Belitung Timur - Bupati Bangka Tengah B. Stakeholder - Dirut PT Timah Tbk - Sekretariat Bersama Ormas Belitung Timur

- C. 9 Orang Anggota dari 52 Orang Anggota Komisi VII DPR RI terdiri dari:
9 Orang Anggota Komisi VII DPR RI hadir fisik
43 Orang Anggota Komisi VII DPR RI izin

I. PENDAHULUAN

1. Rapat Dengar Pendapat dan Rapat Dengar Pendapat Umum Komisi VII DPR RI pada Hari Selasa, 26 Maret 2024 dibuka pukul 13.30 WIB, dipimpin oleh H. Dony Maryadi Oekon, S.T., selaku Ketua Rapat Komisi VII DPR RI dari Fraksi PDI-Perjuangan, dan rapat dinyatakan terbuka untuk umum.
2. Ketua Rapat menyatakan agenda Rapat Dengar Pendapat dan Rapat Dengar Pendapat Umum Komisi VII DPR RI dengan acara:
 - a. Penjelasan tentang petunjuk teknis penerbitan Izin Pertambangan Rakyat (IPR)
 - b. Lain-lain.

II. KESIMPULAN RAPAT

1. Komisi VII DPR RI meminta Plt Dirjen Minerba Kementerian ESDM RI, Dirut PT Timah Tbk, Pj Gubernur Kepulauan Bangka Belitung, Bupati Belitung Timur, Bupati Bangka Tengah, dan Sekretariat Bersama Organisasi Masyarakat Belitung Timur untuk segera berkoordinasi guna menyelesaikan permasalahan terhambatnya penerbitan Izin Penambangan Rakyat (IPR) di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
2. Komisi VII DPR RI meminta Plt Dirjen Minerba Kementerian ESDM RI untuk melakukan pembinaan kepada Pemerintah Daerah khususnya Provinsi Kepulauan Bangka Belitung agar proses pemberian Izin Pertambangan Rakyat (IPR) dapat dipercepat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Komisi VII DPR RI mendesak Plt Dirjen Minerba Kementerian ESDM RI untuk menerbitkan Petunjuk Teknis (Juknis) penerbitan Izin Pertambangan Rakyat (IPR) dan disosialisasikan ke seluruh daerah sehingga kegiatan penambangan rakyat dapat berjalan dan menghindari kerugian ekonomi yang ditimbulkan akibat berhentinya kegiatan penambangan rakyat.

4. Komisi VII DPR RI mendesak Plt Dirjen Minerba Kementerian ESDM RI untuk segera memperbaiki Tata Kelola dan Tata Niaga Timah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung agar kegiatan pertambangan timah dapat berjalan dan berkontribusi bagi perekonomian daerah.
5. Komisi VII DPR RI meminta Plt Dirjen Minerba Kementerian ESDM RI, Dirut PT Timah Tbk, Pj Gubernur Kepulauan Bangka Belitung, Bupati Belitung Timur, Bupati Bangka Tengah, dan Sekretariat Bersama Organisasi Masyarakat Belitung Timur, untuk menyampaikan jawaban tertulis atas seluruh pertanyaan Anggota Komisi VII DPR RI dan disampaikan ke Komisi VII DPR RI paling lambat 02 April 2024.

III. PENUTUP

Rapat ditutup Pukul 15.35 WIB

Jakarta, 26 Maret 2024

Plt. DIRJEN MINERBA KESDM RI

KETUA RAPAT,

**Letjen TNI (Mar) (Purn) BAMBANG
SUSWANTONO S.H., M.H., M.Tr.(Han), CGCAE**

**H. DONY MARYADI OEKON, S.T.
A-176**

Pj. GUBENUR KEP. BANGKA BELITUNG

Dr. SAFRIZAL ZAKARIA ALI, M.Si